



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang Tahun 2019 dapat diselesaikan. Penyusunan LKj akhir tahun 2019 ini disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan wujud Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan Visi dan Misi dalam kurun waktu tahun anggaran 2019. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Tahun 2019 (LKj) ini Bappeda Kabupaten Lumajang Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi Bappeda serta Renstra Bappeda Kabupaten Lumajang. Pada LKj Tahun 2019 ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan Bappeda Tahun 2019.

Mengetahui,
Plt. KEPALA BAPPEDA



Ir. **RETNO WULAN ANDARI, M. Si.**
Pembina
NIP. 19670325 199312 2 001





DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar -----	i
Daftar Isi -----	ii
BAB I PENDAHULUAN -----	1
I.1 Latar Belakang -----	1
I.2 Maksud dan Tujuan -----	1
I.3 Tugas Pokok Dan Fungsi -----	2
I.4 Susunan Organisasi -----	3
I.5 Kondisi Lingkungan Organisasi -----	4
I.6 Isu Strategis Yang Dihadapi -----	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA -----	8
II.1 Visi dan Misi -----	8
II.2 Tujuan Dan Sasaran -----	9
II.3 Rencana Kinerja Tahun 2017 -----	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA -----	14
A. Capaian, Analisis dan Evaluasi Kinerja -----	14
B. Realisasi Anggaran -----	18
BAB IV PENUTUP -----	21



BAB. I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014. Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bertujuan mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna, berwibawa dan bertanggungjawab pada semua jenis urusan pemerintahan.

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja (LKj), yang menggambarkan hasil kerja kegiatan.

Asas akuntabilitas adalah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) yang menggambarkan hasil kerja kegiatan perencanaan pada akhir tahun 2019

I.2 Maksud dan Tujuan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan bagian dari perwujudan implementasi sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintah untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategi pencapaian berupa program dan kegiatan yang selaras. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah yang berhasil dicapai.





Laporan Kinerja (LKj) memiliki dua fungsi utama sekaligus. **Pertama**, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi pemerintah Daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja. **Kedua**, Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) organisasi baik regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

I.3 Tugas Pokok Dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang (pasal 2), mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pememrintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas–tugas pokok tersebut diatas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi :

1. Penetapan rencana kerja dan program/kegiatan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
3. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
4. Penyelenggaraan tata laksana perencanaan pembangunan;





5. Penyelenggaraan pembinaan dan layanan administrasi perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan bidang ekonomi, fisik, dan prasarana serta sosial budaya;
6. Penyusunan pedoman perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan bidang ekonomi, fisik, dan prasarana serta sosial budaya;
7. Pengkoordinasian kegiatan kerjasama perencanaan;
8. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil kepada Bupati;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

I.4 Susunan Organisasi

- 1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - Sub Bagian Penyusunan Program
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - Sub. Bidang Pertanian
 - Sub. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
 - Sub. Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha
 - d. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari :
 - Sub. Bidang Sumber Daya Manusia;
 - Sub. Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
 - Sub. Bidang Pemerintahan dan Aparatur.





- e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
 - Sub. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - Sub. Bidang Penataan Ruang dan Permukiman;
 - Sub. Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan.
- f. Bidang Data dan Evaluasi
 - Sub. Bidang Data dan Informasi;
 - Sub. Bidang Perencanaan dan Pengendalian;
 - Sub. Bidang Evaluasi dan Pelaporan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

I.5 Kondisi Lingkungan Organisasi

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, adapun faktor-faktor lingkungan tersebut meliputi :

1. Lingkungan Internal.

a. Kekuatan

1. Struktur Organisasi atau kelembagaan yang jelas
2. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia memadai
3. Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam pencapaian target perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan
4. Tersedianya sumberdaya manusia yang relatif proporsional dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan, guna menunjang tugas pokok dan fungsi Bappeda;
5. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Bappeda sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman





b. Kelemahan

1. Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM perencana
2. Belum semua kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsi Bappeda didukung oleh *team work* yang terpadu;
3. Belum tersedianya data-data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
5. Sistem informasi perencanaan pembangunan yang tersedia belum berjalan optimal dalam upaya mendukung proses perencanaan yang efektif dan efisien;

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

1. Adanya kesempatan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional
2. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) sehingga dapat menunjang tugas pokok dan fungsi koordinasi Bappeda;
3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan
5. Komitmen SKPD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan





b. Ancaman

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif
2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan
3. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
4. Masih lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD Kabupaten;

I.6 ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI

Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang memungkinkan manajemen membangun rencana strategis dalam rangka pencapaian tujuan secara tepat.

Beberapa permasalahan isu strategis Bappeda Kabupaten Lumajang yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Adanya kebijakan Nasional yang berdampak pada Perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi Perencanaan Pembangunan di Daerah;
- b) Kurangnya ketersediaan, pemerataan dan kualitas SDM yang belum sesuai dengan kompetensi;
- c) Belum optimalnya komitmen dan konsistensi pelaksanaan dokumen Perencanaan;
- d) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian / penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan Pemerintah ;
- e) Masih minimnya pemanfaatan IPTEK dan pengembangan Inovasi Daerah;





- f) Masih kurang terintegrasinya software E-Planing dan E- Budgeting;
- g) Belum tersedianya E- Monev dalam rangka membangun Perencanaan dan evaluasi yang terintegrasi ;
- h) Belum adanya Pejabat Fungsional Perencana di Bappeda Kab.Lumajang;
- i) Adanya sanksi dari Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap keterlambatan Penyelesaian Dokumen Perencanaan ;
- j) Kontrol Masyarakat, Media Sosial, LSM dalam mengevaluasi Kinerja Pemerintahan .





BAB. II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Visi, Misi

Visi adalah cara pandang kedepan yang di dalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana organisasi akan di arahkan, sehingga pada gilirannya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang dapat menjadi dinamisator dan akselerator pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan di bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi pembangunan.

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab tersebut serta berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, maka Sesuai dengan ditetapkan Visi kabupaten Lumajang, yaitu;

“ Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing, Makmur Dan Bermartabat”

Sedangkan misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan visi yang ditetapkan, oleh karenanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang melaksanakan misi yang ke tiga adalah sebagai berikut :

“ Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Benar dan Bersih melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan.”

Dalam mewujudkan misi tersebut aparat perencana dituntut menjunjung tinggi nilai – nilai profesionalitas, disiplin dan etos kerja yang baik dalam membangun perencanaan pembangunan yang berkualitas dan





pelayanan publik yang prima. Mengutamakan kerja keras dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dan mampu mempertimbangkan segala tindakan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki, memperhatikan dan menyiasati perkembangan kondisi lingkungan. Disamping itu juga dapat mewujudkan kebijakan penelitian dan perencanaan pembangunan berdasarkan kerangka pikir yang bertumpu pada nilai – nilai dan peraturan perundangan yang berlaku.

II.2 Tujuan Dan Sasaran

2.2.1 Tujuan :

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi kabupaten dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Bappeda, memproyeksikan sejauh mana pencapaian visi dan misi tersebut bisa terlaksana dengan baik, untuk itu agar dapat diukur keberhasilan dalam mencapai tujuan strategi, setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur sehingga arah kebijakan mudah ditentukan dengan jelas.

Tujuan strategis yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Lumajang dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dengan indikator prosentase (%) penurunan keluhan dan pengaduan masyarakat. Adapun tujuan-tujuan yang ditetapkan Bappeda Kabupaten Lumajang antara lain :





Tabel 2. 1
TUJUAN – INDIKATOR

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

1.1.1 Sasaran :

Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Lumajang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*performace plan*).

Penetapan sasaran strategis ini diberikan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumberdaya untuk tiap-tiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran strategis Bappeda Kabupaten Lumajang merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Bappeda. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan tujuan strategis terkait juga telah dicapai.





Sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan visi dan misi Bappeda antara lain :

Tabel 2.2
TUJUAN – SASARAN

No.	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase amasyarakat yang diakomodir dalam RKPD
			Persentase OPD dengan Capaian Program Minimal 85 %
			Persentase dokumen kajian yang bisa dimanfaatkan

II.3 Rencana Kinerja Tahun 2019

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, yang dijabarkan dalam Renstra Bappeda tahun 2023, Rencana Kinerja Bappeda Kabupaten Lumajang Tahun 2019 diwujudkan dalam berbagai program sebagaimana tersebut dalam matrik rencana kerja dan target kinerja tahunan sebagai berikut :





NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH DANA Rp.
	BELANJA LANGSUNG	
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.921.253.000
a	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.921.253.000
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	430.472.000
a	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	204.947.000
b	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	225.525.000
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	53.660.000
a	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	5.000.000
b	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2.000.000
c	Penyusunan Rencana Kerja	2.000.000
d	Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran OPD	44.660.000
4	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.465.700.000
a	Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	742.500.000
b	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	102.100.000
c	Penyusunan dan Analisis data dan Informasi Pembangunan Daerah	621.100.000
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	963.270.000
a	Perencanaan Pertanian dan Ketahanan Pangan	195.000.000
b	Perencanaan Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha	450.670.000
c.	Perencanaan Koperasi Usaha mikro dan Pariwisata	317.600.000
6	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	932.500.000
a	Perencanaan Sumber Daya Manusia	412.500.000
b	Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat	280.000.000
c	Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur	240.000.000
7	PROGRAM PERENCANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK DAN PRASARANA	3.302.163.000
a	Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Permukiman	1.355.696.600
b	Perencanaan Prasarana Wilayah dan perhubungan	873.706.400
c	Perencanaan Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan	1.072.760.000
8	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	256.500.000
a	Fasilitasi dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan	256.500.000
	Jumlah Semua	9.325.528.000





Target Kinerja Tahun 2019 Bappeda Sebagai SKPD Kabupaten

S A S A R A N							
Uraian	Indikator	Formula Satuan	Target Tahun Ke				
			2019	2020	2021	2022	2025
Meningkatnya konsistensi dan Keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	$\frac{\sum \text{Aspirasi Masy. Yg diakomodir dalam RKPD tahun n}}{\sum \text{Aspirasi Usulan dalam Musrenbang tahun n}} \times 100 \%$ Pejelasan : Aspirasi = usulan aspirasi yg masuk dalam poral musrenbang	14.%	26%	32%	41%	45%
	Persentase OPD dengan Capaian Program Minimal 85 %	$\frac{\sum \text{OPD dengan Capaian Program Min 85 \% tahun n -1}}{\sum \text{Seluruh OPD}} \times 100 \%$ 85 % dari target yang ditetapkan di renjanya	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase dokumen kajian yang bisa dimanfaatkan	$\frac{\sum \text{Kajian yang dimanfaatkan tahun}}{\sum \text{kajian yang di susun}} \times 100 \%$ Kajian yg telah disusun dapat dimanfaatkan tidak tahun berkenanaan, artinya bisa dipergunakan pada tahun selanjutnya misal RPJP	72%	73%	74%	75%	75%



BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2019-2023 yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019.

A. CAPAIAN, ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA

Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam menilai berbagai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran maupun tujuan yang ditetapkan dalam Visi dan Misi. Pengukuran kinerja adalah merupakan hasil dari penilaian sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan kinerja sasaran, dengan memanfaatkan data pencapaian kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian masing-masing indikator sasaran. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pencapaian hasil pengukuran kinerja kegiatan.





A.1. Capaian Kinerja Tahun 2019

Selanjutnya pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran pada Bappeda Kabupaten Lumajang pada Tahun 2019, parameter penentuan keberhasilan/ketidakberhasilan menggunakan skala sebagaimana berikut:

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d <85%	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d <70%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X<55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil





Berdasarkan pelaksanaan program/kegiatan Bappeda Kabupaten Lumajang pada Tahun 2019, diperoleh pencapaian indikator kinerja utama (IKU) antara lain sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel
DATA PENCAPAIAN IKU BUPATI TAHUN 2019

No	Sasaran Srtategis	IKU	Rumus/Formula Perhitungan Atas IKU	Target Kinerja Tahun 2019 (mengacu ke dokumen RPJMD 2018-2023)	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2019	
					Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya konsistensi dan Keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam APBD	$\frac{\sum \text{Aspirasi Masy. Yg diakomodir dalam RKPD tahun n}}{\sum \text{Aspirasi Usulan dalam Musrenbang tahun n}} \times 100 \%$ Pejelasan : Aspirasi = usulan aspirasi yg masuk dalam portal musreimbang	14%	49,82%	357,07%
		Persentase OPD dengan Capaian Program Minimal 85 %	$\frac{\sum \text{OPD dengan Capaian Program Min 85 \% tahun n -1}}{\sum \text{Seluruh OPD}} \times 100 \%$ 85 % dari target yang ditetapkan di renjanya	100%	100%	100%
		Persentase Dokumen Kajian yang bisa dimanfaatkan	$\frac{\sum \text{Kajian yang dimanfaatkan tahun}}{\sum \text{kajian yang di susun}} \times 100 \%$ Kajian yg telah disusun dapat dimanfaatkan tidak tahun berkenanaan, artinya bisa dipergunakan pada tahun selanjutnya misal RPJP	72%	100%	100 %





A.2. Analisis Faktor-Faktor Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja di atas tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung dan penghambat keberhasilan pencapaian kinerja tersebut. Beberapa faktor penghambat pencapaian kinerja tersebut antara lain :

- a. Lemahnya/ kurang pemahaman para stakeholder terhadap sistem perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Lemahnya tingkat koordinasi antar instansi terkait
- c. Sistem tata kelola pemerintahan (baca: database, sistem, pola kerja dll) masih banyak yang bersifat manual.
- d. Adanya perubahan dan atau tumpang tindih regulasi dari pemerintah pusat/ provinsi.
- e. Rendahnya kapasitas fiskal APBD Kabupaten Lumajang.

Disamping hal diatas, terdapat pula faktor-faktor pendukung pencapaian target-target kinerja tersebut, antara lain yaitu :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Bappeda Kabupaten Lumajang.
- b. Mulainya penerapan teknologi lebih lanjut pada beberapa sektor program/kegiatan pendukung pencapaian kinerja
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat/stakeholder dalam keterlibatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

A.3. Analisis Program/Kegiatan

Dalam upaya pencapaian target kinerja, Bappeda Kabupaten melaksanakan beberapa program/kegiatan penunjang utama disamping kegiatan administrasi perkatoran dana pemenuhan sarana dan prasarana penunjang. Program/kegiatan penunjang tersebut antara lain :





a. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Melalui Program ini yang dianggarkan sebesar Rp. 1.921.263.000 untuk 1 kegiatan yaitu Pelayanan administrasi Perkantoran digunakan untuk mendukung Kebutuhan administrasi perkantoran. dari Anggaran tersebut sudah terealisasi sebesar Rp. 1.756.674.480,-

b. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Melalui Program ini yang dianggarkan sebesar Rp. 430.472.000 untuk 2 kegiatan yaitu Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur digunakan untuk mendukung Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur, dari Anggaran tersebut sudah terealisasi sebesar Rp. 421.997.123,-

c. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Melalui Program ini yang dianggarkan sebesar Rp. 53.660.000 untuk 4 kegiatan yaitu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP, Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, Penyusunan Rencana Kerja dan Penyusunan Rencana Kerja' dari Anggaran tersebut sudah terealisasi sebesar Rp. 40.447.005,-

d. **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan program yang diselenggarakan oleh Bappeda Lumajang dalam rangka pemenuhan pelaksanaan pembangunan urusan Perencanaan Pembangunan. Program ini terdiri dari 3 Kegiatan, antara lain yaitu Penyelenggaraan Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah, Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Penyusunan analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah. Program ini dianggarkan sebesar Rp. 1.465.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.222.461.100,-.

e. **Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

Melalui program ini, dilakukan kajian-kajian perencanaan dan pengembangan Kabupaten Lumajang khususnya di bidang perekonomian. Program ini dianggarkan sebesar Rp. 963.270.000,- Program ini terdiri dari 3 kegiatan yaitu, Perencanaan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perencanaan Perindustrian, Perdagangan dan





Dunia Usaha, Perencanaan Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata dari Anggaran tersebut sudah terealisasi Sebesar Rp. 898.218.500,-

f. Program Perencanaan Sosial Budaya

Di dalam APBD Kabupaten Lumajang Tahun 2019, Program Perencanaan Sosial Budaya dianggarkan sebesar Rp. 932.500.000,- Program ini terdiri dari 3 kegiatan yaitu Perencanaan Sumberdaya Manusia, Perencanaan Kesejahteraan masyarakat dan perencanaan Pemerintahan dan Aparatur dari anggaran ini sudah terealisasi Sebesar Rp.653.652.850,-

g. Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana

Kabupaten Lumajang Tahun 2019 melalui Program ini di dalam melaksanakan kegiatan terdiri dari Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman, Perencanaan Prasarana Wilayah dan Perhubungan dan Perencanaan Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan program ini di dalam APBD dianggarkan sebesar Rp. 3.302.163.000,- sampai saat ini terealisasi sebesar Rp 2.858.953.840,-

h. Program Penelitian dan Pengembangan Wilayah

Melalui program ini, Bappeda Lumajang melakukan Kajian dibidang Disparitas Antar Wilayah dengan jumlah biaya sebesar. 256.500.000,- untuk 1 kegiatan. Fasilitasi dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan dimana anggaran ini sudah terealisasi sebesar Rp. 117.500.000,-

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2019, jumlah alokasi anggaran Bappeda Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 9.325.528.000,- hanya terdiri dari Belanja Langsung sedangkan sebesar Belanja Tidak Lansung dikelola Oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dari total anggaran tersebut Realisasi terakhir pada Akhir Tahun 2019 sebesar Rp. 7.969.904,- atau sebesar 85,47 % secara detail penyerapan anggaran tersaji dalam tabel berikut :





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2019

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SISA	%
	BELANJA LANGSUNG				
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.921.253.000	1.738.027.980	183.225.020	90,46
a	Pelayanan Admiistrasi Perkantoran	1.921.253.000	1.738.027.980	183.225.020	90,46
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	430.472.000	421.997.123	8.474.877	98,03
a	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabiltasi Sarana dan Prasarana Aparatur	204.947.000	203.094.999	1.852.001	99,10
b	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	225.525.000	218.902.124	6.622.876	97,06
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CANPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	53.660.000	40.447.050	13.212.950	75,38
a	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	5.000.000	4.673.000	327.000	93,46
b	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2.000.000	1.821.300	178.700	91,07
c	Penyusunan Rencana Kerja	2.000.000	1.973.000	27.000	98,65
d	Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran (RKA) OPD	44.660.000	31.979.750	12.680.250	71,61
4	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.465.700.000	1.222.461.100	246.763.900	83,40
a	Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	742.500.000	659.222.500	183.427.500	88,78
b	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	102.100.000	69.267.000	32.833.000	67,84
c	Penyusunan dan Analisis data dan Informasi Pembangunan Daeah	621.100.000	493.971.600	127.128.400	79,53
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	963.270.000	898.218.500	65.051.500	93,25
a	Perencanaan Pertanian dan Ketahanan Pangan	195.000.000	190.619.000	4.381.000	97,75
b	Perencanaan Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha	450.670.000	430.953.000	19.717.000	95,62
c	Perencanaan Koperasi Usaha mikro dan Pariwisata	317.600.000	276.64.500	40.953.500	87,11
6	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	932.500.000	653.652.850	278.847.150	70,10
a	Perencanaan Sumber Daya Manusia	412.500.000	179.563.500	232.936.500	43,53





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2019

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SISA	%
b	Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat	280.000.000	265.260.000	14.470.000	94,74
c.	Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur	240.000.000	208.829.350	31.170.650	87,01
7.	PROGRAM PERENCANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK DAN PRASARANA	3.302.163.000	2.858.953.840	443.809.160	86,60
a	Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Permukiman	1.355.696.600	1.303.203.250	52.493.350	96,18
b	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Perhubungan	873.706.400	615.104.600	258.601.800	70,40
c	Perencanaan Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan	1.072.760.000	940.645.990	132.140.010	87,68
8	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	256.500.000	117.500.000	139.000.000	45,81
a	Kajian Disparitas Antar Wilayah	256.500.000	117.500.000	139.000.000	45,81
	Jumlah Semua	9.325.518.000	7.950.658.343	1.374.859.657	85,26





BAB. IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Pada Tri Bulan Ketiga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai wujud membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 yang dicatagorikan memuaskan, karena nilai capainnya di atas standart penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja yang dibebankan kepada Perangkat Daerah (PD)

1. Sistem Informasi Perencanaan program/kegiatan belum optimal

Pada Sistem aplikasi online Musrenbang dan RKPD masih belum mencakup secara online kepada Pemerintah Desa dan Reses DPRD.

2. Singkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan

Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen perencanaan Kabupaten masih belum sepenuhnya selaras dan terjabarkan secara sesuai dalam RENSTRA maupun RENJA PD.

3. Dinamika Sinergi antar aparatur

Masih cukup tingginya ego sektoral antar bidang maupun PD sehingga perlu peningkatan komitmen bersama dalam integrasi program/kegiatan.

B. Langkah Kedepan

Langkah Langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan rencana aksi antara lain :





1. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. KISS Program/Kegiatan Pembangunan
3. FGD Bidang-Bidang Perencanaan Pembangunan

C. Saran

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan kontribusi sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, alat kontrol, evaluasi / koreksi serta pendorong terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa. Dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini kami sadar dan memahami bahwa masih jauh dari sempurna. Dengan demikian masukan, saran, kritrik dan solusi yang bersifat membangun guna penyusunan laporan kedepan sangat kami harapkan.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

- Matrik Rensta tahun 2018-2023
- Perjanjian Kierja 2020

